

Program Kedua Calon Dinilai Belum Konkret

Koran Tempo - 14 Jan '19. (c)

Komnas HAM dan kelompok masyarakat menilai calon presiden belum berpihak pada penegakan HAM.



Keluarga korban pelanggaran HAM di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 31 Mei lalu

Arkheलास Wisnu

aw.triyoop@tempo.co.id

JAKARTA — Program aksi dalam visi dan misi dua calon presiden dan wakil presiden ihwal persoalan hak asasi manusia (HAM) dinilai belum konkret. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno perlu mengeksplorasi strategi dan langkah-langkah program untuk menjawab berbagai persoalan HAM. "Visi-misi dan program yang ada saat ini masih di permukaan," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Damanik, kedua kandidat berkesempatan mengeksplorasi gagasannya di bidang HAM dalam debat perdana. Kamis mendatang. Sejumlah pertanyaan panelis debat perdana, menurut dia, seharusnya bisa bermanfaat untuk mendetailkan strategi penyelesaian persoalan HAM. "Seharusnya mereka lebih siap. Debat memberi ruang publik untuk mendengar, dan sangat mungkin mereka menyusun strategi yang berbeda," ucapnya.

Tahapan pemilihan umum memasuki masa debat kandidat, yang akan berlangsung pada Kamis pekan ini. Isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme menjadi tema debat perdana

yang akan berlangsung sekitar 90 menit tersebut. Damanik, bersama Bagir Manan, Hikmahanto Juwana, Agus Rahardjo, Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis, menjadi panelis debat. Kedua kubu pun bersiap menghadapinya dengan memantapkan penyampaian visi-misi dan program mereka.

Ketua Divisi Hukum dan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Arif Nur Fikri, menuturkan visi, misi, dan program aksi kedua pasangan calon belum berpihak pada penegakan HAM. "Karena tidak memiliki rencana konkret," katanya. Menurut dia, debat kandidat hanya akan diisi saling tuding atas keterlibatan calon dalam pelanggaran HAM masa lalu dan janji-janji penyelesaian kasus HAM yang belum ditunaikan.

Arif memprediksi Jokowi akan mengungkapkan isu-isu ihwal hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang menjadi capaian pemerintah, dengan mengabaikan sejumlah catatan pelanggaran HAM dalam isunya. Sedangkan Prabowo, kata Arif, akan mengambil isu-isu HAM yang dinilai tak diselesaikan pemerintah tapi mendapat sorotan publik, seperti kasus Novel Baswedan. "Ini hanya melegitimasi komitmen, tapi minim wacana dan penyelesaian persoalan HAM," tuturnya.

Isu pun khawatir isu HAM hanya menjadi komoditas politik lima tahunan.

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, berpendapat perdebatan soal HAM akan menjadi beban kedua kandidat. Sebab, ia menilai persoalan hukum dan HAM belum menjadi prioritas pemerintah Jokowi. Adapun Prabowo, kata dia, akan terbebani dengan dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran HAM masa lalu. Menurut dia, presiden terpilih seharusnya tetap memberi prioritas pada penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. "Yang paling mencolok saat ini adalah tak ada penuntasan pelanggaran HAM berat," ujarnya.

Adapun Direktur Program Tim Kampanye Nasional Aria Bima mengatakan persoalan HAM yang diusung kandidat akan menyroti persoalan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut dia, persoalan ini sama pentingnya dengan keinginan untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu. "Jangan terlalu melihat HAM yang dikapitalisasi secara politis," ucapnya. Sedangkan Koordinator Juru Debat Badan Pemenangan Nasional, Ledia Hanifa Amaliah, menuturkan pihaknya sepakat tak mengungkit persoalan pribadi dan masa lalu setiap kandidat. ● LINDA HAIRANI

Aria Bima
Direktur Program
Tim Kampanye
Nasional Joko
Widodo-Ma'ruf
Amin.



Pembahasan HAM Harus Melihat Substansi

Apa yang akan jadi pembahasan dalam debat pertama, yang mengangkat persoalan hak asasi manusia (HAM)?

Persoalan HAM yang diungkapkan lebih pada hak sipil dan hak politik. Setiap warga negara memiliki persamaan di bidang hukum dan pemerintahan. Kalau ada orang yang selama 73 tahun belum pernah melihat listrik, apakah itu bukan persoalan HAM? Saya kira itu substansi yang harus diperhatikan, bahwa HAM harus dilihat juga hak ekonominya, hak sosial, dan hak budaya.

Artinya, Jokowi-Ma'ruf akan lebih menyroti HAM di aspek itu?

Bukan lebih. Masalah yang berkaitan dengan kejahatan HAM masa lalu itu diselesaikan juga. Prabowo mungkin paling takut kalau ditanya soal kejahatan HAM, dan Jokowi bisa dianggap tidak menyelesaikan HAM. Namun apakah memang saat ini sudah dianggap waktu yang tepat dan berani membuka kejahatan HAM masa lalu?

Bagaimana komitmen Jokowi dalam penyelesaian HAM?

Pak Jokowi benar-benar ingin kejahatan HAM itu diselesaikan secepat-cepatnya. Secara subyektif itu, cuma persepsi penyelesaiannya yang tidak tuntas. Tidak satu persepsi. Ini konsep rekonsiliasi dan menjadi satu fondasi, bukan cacik maki dan saling menyalahkan. Saat harus menjunjung tinggi ini sebagai satu kesepakatan nasional yang mengikat, secara psikopolitis kita belum siap.

Apakah persoalan HAM yang seperti ini tidak akan terlalu diangkat sebagai isu utama?

Ini tetap penting. Mengungkap kejahatan masa lalu yang belum selesai itu sama pentingnya dengan hak untuk mendapatkan listrik di Papua, yang selama ini terbengkalai. Jangan terlalu melihat HAM yang dikapitalisasi secara politis. Mengapa hak-hak sosial masyarakat ini tidak diangkat juga?



Ledia Hanifa Amaliah

Koordinator Juru Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kami Tidak Akan Bicara Personal

Apa saja yang akan disampaikan Prabowo-Sandi dalam debat pertama ihwal isu hak asasi manusia?

Kami akan mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan panelis. Kami juga mengelaborasi sejumlah isu yang berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.

Jokowi akan berfokus pada kinerja pemerintahan, bagaimana strategi Prabowo menjawab persoalan HAM?

Pertama, yang harus dijelaskan adalah konsep HAM yang ada dalam visi dan misi kami. Kemudian kami melihat ukuran kinerja dari inkumben, seperti apa dan apa yang harus diperbaiki. Bagaimana kaitan dengan evaluasi dan sudut pandang kami terhadap pemerintah itu yang ditawarkan melalui visi dan misi.

Sejumlah koalisi masyarakat sipil dan aktivis HAM menyatakan visi-misi dan program aksi belum konkret menyetujui persoalan HAM. Bagaimana tanggapan Anda?

Makanya perlu mendengarkan dengan baik saat debat karena kita semua menyepakati bahwa ini adalah forum untuk menyampaikan solusi.

Apakah koalisi akan berfokus menggarap isu yang menjadi sorotan publik, seperti kasus pelanggaran HAM masa lalu?

Kami bersepakat tidak bicara personal masa lalu masing-masing. Kalau kasus per kasus itu bisa jadi muncul bukan dari kami, melainkan dari panelis, dan itu bisa menjadi bagian penting. Saya pikir itu wajar. Kalau Pak Jokowi mau menyebut pencapaian kinerja, pasti menyebutkan kasus-kasus HAM masa lalu juga, dong. Visi dan misi yang mau dimunculkan dan pencapaian kinerja tentu wajar muncul dalam debat.

Bagaimana Prabowo dan Sandiaga mempersiapkan materi HAM dalam debat perdana?

Kami punya tim dari masing-masing partai politik yang terlibat dalam pembahasan. Ada tim pakar dan ada perwakilan parpol yang membantu menyusun materi. Kami mulai menyiapkan materi debat dan seluruh teknisnya.

● ARKHELAAS WISNU